

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017 hingga tahun 2018, jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih besar dibandingkan dengan jumlah Usaha Besar (UB) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan tahun 2017-2018	
	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	Pangsa (%)	Jumlah (unit)	Pangsa (%)
UMKM	62.928.077	99,99	64.199.606	99,99	1.271.529	2,02
UB	5.460	0,1	5.550	0,1	90	1,64

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017-2018.

Pada tahun 2017 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 62.928.077 unit sedangkan pada tahun 2018 jumlah unit UMKM mencapai 64.199.606 unit yang artinya bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat dengan penambahan unit UMKM sebesar 1.271.529 atau sebesar 2,02% dari tahun sebelumnya sedangkan pada Usaha Besar berjumlah 5.460 unit pada tahun 2017 dan 5.550 unit pada tahun 2018 yang artinya mengalami kenaikan Usaha Besar sebesar 90 unit atau 1,64% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki persentase 99.99% dari seluruh total unit usaha yang ada di Indonesia. Selain itu, kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja cukup besar dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM dan UB tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan tahun 2017-2018	
	Jumlah (orang)	Pangsa (%)	Jumlah (orang)	Pangsa (%)	Jumlah (orang)	Pangsa (%)
UMKM	120.260.177	96,82	120.598.138	97,00	337.961	0,28
UB	3.828.953	0,1	3.619.507	0,1	-209.446	-5,47

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017-2018.



Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2018 adalah sebesar 120.598.138 orang meningkat 337.961 orang atau 0,28% dari tahun sebelumnya sedangkan Usaha Besar pada tahun 2018 hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 3.619.507 orang dan mengalami penurunan sebesar 209.446 orang atau 5,47% dari tahun sebelumnya. Adapun kontribusi UMKM pada PDB dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor UMKM dan UB tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan tahun 2017-2018	
	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)
UMKM	12.840.859	60,90	14.038.598,5	61,07	1.197.739,6	9,64
UB	5.020.576,4	39,10	5.464.703,2	38,93	444.126,8	8,85

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017-2018.

Pada tahun 2018 UMKM juga memiliki kontribusi yang besar terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku Indonesia yaitu sebesar Rp4.038,60 T meningkat sebesar Rp1.197,74 T atau 9,64% dari tahun sebelumnya sedangkan Usaha Besar pada tahun 2018 sebesar Rp5.464,70 T meningkat sebesar Rp444,126 T atau 8,65% dari tahun sebelumnya. Deskripsi data tersebut menunjukkan peran besar sektor UMKM terhadap perekonomian Indonesia.

Namun demikian, UMKM juga memiliki berbagai masalah yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan UMKM itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi UMKM menurut Wahid (2014) diantaranya yaitu kesulitan modal (35.7%), pemasaran (34.8%), bahan baku (10.8%), bahan bakar minyak (BBM)/energi (4.1%), transportasi (2.8%), keterampilan (1.2%), upah buruh (0.8%) dan lainnya (9.8%). Terkait dengan permodalan, sebagian UMKM lebih memilih menggerakkan usahanya dengan modal sendiri. Menurut Wahid (2014), hanya 15.6% UMKM yang meminjam dari pihak lain. Adapun berbagai pinjaman modal yang diperoleh UMKM dari pihak lain ini ternyata lebih banyak berasal dari teman, rentenir, kerabat dan lainnya. Pinjaman modal dari pihak ketiga ini umumnya bersifat informal dan perorangan.

Kesulitan UMKM dalam mengakses permodalan di lembaga keuangan dikarenakan kebanyakan UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir, sehingga lembaga keuangan kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan kondisi usaha dari UMKM. Hal tersebut juga mempersulit lembaga keuangan untuk meminimalisir risiko *default* atas kredit yang dialokasikan kepada UMKM. Selain itu, banyak UMKM yang memiliki kelayakan bisnis (*feasible*) namun tidak memenuhi persyaratan kelayakan kredit (*bankable*),

ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan dan kurangnya *track record*.

Pada dasarnya permodalan bukanlah hanya didapat melalui pinjaman bank saja namun saat ini dalam permodalan usaha bisa didapat melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi pada sektor UMKM terus meningkat berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2017 hingga 2018. Pada tahun 2018 jumlah investasi pada sektor UMKM Rp4.244,685 T meningkat Rp287,804 T atau 7,27% dari tahun sebelumnya sedangkan sektor Usaha Besar pada tahun 2018 sebesar Rp1.680,136 T meningkat sebesar Rp100,667 T atau 6,37% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik modal lebih tertarik berinvestasi pada sektor UMKM dibandingkan pada sektor Usaha Besar, data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Laju investasi pada sektor UMKM dan UB tahun 2017-2018

Indikator	Tahun 2017		Tahun 2018		Perkembangan tahun 2017-2018	
	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)	Jumlah (Rp miliar)	Pangsa (%)
UMKM	3.956.881,4	60,08	4.244.685,6	60,42	287.804	7,27
UB	1.579.468	39,92	1.680.136,1	39,58	100.667	6,37

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017-2018.

Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui PT Jamkrindo (Persero) bekerja sama dalam upaya peningkatan kualitas UMKM melalui program yang dimiliki PT Jamkrindo (Persero) yaitu pemeringkatan dan pembinaan UMKM. PT Jamkrindo (Persero) membuat suatu skema pembiayaan yang memudahkan UMKM untuk memperoleh kemudahan akses permodalan yaitu dengan diadakannya *platform* layanan UMKM Layak. *Platform* ini merupakan sebuah *marketplace guarantee* berupa *platform digital* yang dibuat dengan tujuan mengakomodir kebutuhan UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan UMKM. Saat ini UMKM yang telah terdaftar sebanyak 1.870 UMKM pada *platform* layanan UMKM Layak. Namun, selama ini *platform* layanan UMKM Layak hanya sebatas membantu UMKM untuk mendapatkan akses permodalan melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Oleh karena itu, sistem *platform* layanan UMKM Layak akan diintegrasikan dengan implementasi *equity crowdfunding* (layanan urun dana). Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) adalah penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka (POJK No.37/POJK.4/2018). Terdapat tiga pihak dalam sistem *equity crowdfunding* atau layanan urun dana yaitu Penyelenggara, Penerbit dan Pemodal. Adanya *equity crowdfunding* pada *platform* layanan UMKM Layak maka



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

akan lebih mempermudah para UMKM untuk mendapatkan permodalan dari para pemilik modal dalam skema investasi melalui layanan *equity crowdfunding* yang diintegrasikan pada sistem *platform* layanan UMKM Layak.

1.2 Tujuan

Berdasarkan latar belakang di atas tujuan dari kajian pengembangan bisnis ini adalah:

1. Merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dengan melakukan peningkatan *platform* layanan UMKM Layak melalui implementasi *equity crowdfunding* pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat.
2. Menyusun perencanaan pengembangan bisnis peningkatan *platform* layanan UMKM Layak melalui implementasi *equity crowdfunding* pada PT Jamkrindo (Persero) Jakarta Pusat berdasarkan aspek non finansial dan aspek finansial.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies